

KURIKULUM MERDEKA SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA

Husnul Amaliyah¹, Elsa Oktapia², Regi Mastio³

UIN Raden Fatah Palembang

e-mail: 23041070262@radenfatah.ac.id, 23041070251@radenfatah.ac.id,
23041070269@radenfatah.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan Inklusif suatu pendekatan strategis yang menempatkan semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dalam satu sistem pendidikan yang setara dan adil. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak yang sama untuk belajar dan berkembang, tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks Indonesia, tantangan pendidikan inklusif masih cukup besar, baik dari segi infrastruktur, kesiapan guru, maupun pemahaman masyarakat. Kurikulum Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hadir sebagai solusi baru terhadap berbagai permasalahan tersebut. Dengan prinsip fleksibilitas, diferensiasi pembelajaran, dan penekanan pada profil pelajar Pancasila, kurikulum ini memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk menyesuaikan metode mengajar dengan kebutuhan setiap peserta didik. Dalam konteks pendidikan inklusif, Kurikulum Merdeka menjadi instrumen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah, adaptif, dan kolaboratif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara efektif dalam pendidikan inklusif di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi pustaka, penulis menganalisis relevansi kurikulum tersebut dalam mendukung tujuan pendidikan inklusif nasional, serta mengidentifikasi tantangan yang masih perlu diatasi agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Kurikulum Merdeka, Diferensiasi Pembelajaran

ABSTRACT

Inclusive education is a strategic approach that places all learners, including those with special needs, within an equal and fair education system. The ultimate goal is to ensure that every individual has the same right to learn and develop, without discrimination. In the Indonesian context, the challenges of inclusive education are still considerable, both in terms of infrastructure, teacher readiness, and community understanding. The Merdeka Curriculum launched by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology is a new solution to these problems. With the principles of flexibility, learning differentiation, and emphasis on the Pancasila learner profile, this curriculum provides wider space for teachers to adapt teaching methods to the needs of each learner. In the context of inclusive education, Merdeka Curriculum is an important instrument in creating a friendly, adaptive, and collaborative learning environment. This article aims to examine how Merdeka Curriculum can be effectively implemented in inclusive education in Indonesia. Through a descriptive qualitative approach and literature study, the author analyzes the curriculum's relevance in supporting national inclusive education goals and identifies challenges that still need to be overcome to optimally achieve these goals.

Keywords: Merdeka Curriculum, Inclusive Education, Differentiated Learning

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memastikan bahwa setiap peserta didik, tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi

Copyright (c) 2025 MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan

lainnya, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Konsep ini menekankan pada partisipasi penuh dan pencapaian semua siswa dalam lingkungan belajar bersama (Florian & Black-Hawkins, 2011). Di Indonesia, konsep ini semakin mendapat perhatian seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pendidikan. Namun, implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan sumber daya pendidikan. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah belum meratanya pelatihan bagi guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus, padahal kompetensi guru merupakan faktor kunci keberhasilan inklusi (Sharma et al., 2019).

Profil Pelajar Pancasila, yang menjadi salah satu elemen kunci dalam Kurikulum Merdeka, menekankan nilai-nilai seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nilai-nilai ini diharapkan dapat membentuk karakter peserta didik yang inklusif dan menghargai keberagaman, sejalan dengan tujuan pendidikan karakter untuk membangun masyarakat yang kohesif dan adil (Lickona & Davidson, 2012). Dengan demikian, siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Namun, implementasi Kurikulum Merdeka dalam konteks pendidikan inklusif tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah kesiapan pendidik dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum ini. Diperlukan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan agar pendidik mampu mengelola pembelajaran yang inklusif secara efektif, karena adaptasi kurikulum membutuhkan pemahaman pedagogis yang mendalam (Mitchell & Sutherland, 2020). Tanpa kesiapan yang memadai, tujuan dari Kurikulum Merdeka mungkin tidak dapat tercapai sepenuhnya.

Selain itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah, sangat diperlukan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif. Kolaborasi antara sekolah dan komunitas dapat memperkuat upaya mewujudkan pendidikan yang ramah bagi semua peserta didik, menciptakan apa yang disebut sebagai "komunitas peduli" yang mendukung inklusi (Ainscow & Messiou, 2018). Partisipasi aktif dari semua stakeholder akan memastikan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam mendukung pendidikan inklusif. Pengembangan sumber belajar yang aksesibel dan pemanfaatan teknologi adaptif dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai latar belakang dan kemampuan (Alnahdi, 2014). Teknologi dapat menjadi jembatan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pembelajaran, terutama bagi siswa dengan kebutuhan khusus.

Evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap implementasi Kurikulum Merdeka dalam konteks pendidikan inklusif sangat penting dilakukan. Proses evaluasi yang formatif dan berkelanjutan dapat membantu mengidentifikasi praktik baik serta area yang memerlukan perbaikan dalam implementasi inklusi (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017). Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul serta mencari solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kurikulum. Dengan evaluasi yang kontinu, perbaikan dan penyesuaian dapat dilakukan secara tepat waktu. Sejak tahun 2003, praktik pendidikan inklusif di Indonesia telah berkembang pesat, dengan lebih dari 36.000 satuan pendidikan yang menyelenggarakannya. Meskipun demikian, keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada penyesuaian faktor-faktor lingkungan yang menjadi penghambat belajar anak dengan kebutuhan khusus (Sunardi et al., 2011). Hal ini menuntut adanya komitmen dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung bagi semua siswa. Pendidikan inklusif harus menjadi bagian dari kebijakan nasional, bukan hanya inisiatif sekolah.

Pendidikan inklusif bukan hanya tentang memasukkan peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler, tetapi juga tentang menciptakan budaya sekolah yang menghargai keberagaman dan memberikan dukungan penuh bagi semua siswa. Perubahan ini memerlukan pergeseran dari fokus pada defisit individu menjadi fokus pada konteks dan sistem yang mendukung pembelajaran semua siswa (Slee, 2018). Oleh karena itu, perubahan paradigma dan komitmen dari seluruh stakeholder pendidikan menjadi kunci keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Semua pihak harus memahami pentingnya inklusi dan berperan aktif dalam mewujudkannya. Dalam konteks globalisasi, pendidikan inklusif juga menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan suatu negara dalam bidang pendidikan, seringkali dikaitkan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 4 mengenai pendidikan berkualitas (UNESCO, 2017). Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan inklusif agar dapat bersaing dan berkontribusi dalam tatanan global. Pendidikan inklusif yang berkualitas akan mencerminkan komitmen negara terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan inklusif perlu terus didorong untuk menemukan model dan strategi pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan konteks lokal. Kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan menjadi penting dalam upaya ini, karena pengetahuan yang relevan secara kontekstual sangat krusial untuk praktik inklusif yang efektif (Mittler, 2012). Dengan penelitian yang mendalam, implementasi pendidikan inklusif dapat dilakukan berdasarkan bukti dan praktik terbaik. Kurikulum Merdeka, yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, hadir sebagai solusi inovatif untuk menjawab tantangan tersebut. Kurikulum ini menekankan fleksibilitas dalam pembelajaran, memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan metode dan materi ajar sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing peserta didik, sebuah prinsip yang mendasar bagi pendidikan inklusif (Operti et al., 2014). Dengan demikian, diharapkan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Kurikulum ini juga memperkuat penerapan nilai-nilai inklusif dalam setiap praktik pengajaran di kelas.

Kurikulum Merdeka memberikan peluang bagi sekolah untuk berinovasi dalam menciptakan program-program yang mendukung pendidikan inklusif. Sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta lingkungan sekitarnya. Fleksibilitas kurikulum memungkinkan responsivitas yang lebih besar terhadap keragaman siswa, yang merupakan inti dari pendekatan inklusif (Florian & Spratt, 2013). Fleksibilitas yang ditawarkan memungkinkan sekolah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan siswa. Salah satu prinsip utama dalam Kurikulum Merdeka adalah diferensiasi pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar setiap siswa, sebuah strategi kunci untuk memastikan akses dan partisipasi semua pelajar dalam kurikulum umum (Tomlinson & Moon, 2013). Dengan diferensiasi, diharapkan tidak ada siswa yang tertinggal atau merasa terpinggirkan dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan inklusif yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan. Penerapan diferensiasi yang konsisten dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dan memfasilitasi pembelajaran kolaboratif yang efektif.

Peran serta aktif dari peserta didik dalam proses pembelajaran juga menjadi fokus dalam Kurikulum Merdeka. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student-centered learning) terbukti dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan hasil belajar, terutama dalam lingkungan yang beragam (Cornelius-White, 2013). Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar, sehingga hasil belajar yang

dicapai lebih optimal. Siswa didorong untuk menjadi pembelajar mandiri yang mampu mengembangkan potensinya secara maksimal. Pendidikan inklusif juga berkaitan erat dengan upaya pengentasan diskriminasi dan peningkatan kesetaraan dalam masyarakat. Pendidikan inklusif dipandang sebagai sarana transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil, menantang struktur dan praktik eksklusif (Artiles & Kozleski, 2016). Dengan memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Pendidikan inklusif menjadi salah satu cara untuk membangun fondasi masyarakat yang menghargai perbedaan dan keberagaman.

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi pendidikan inklusif berbasis Kurikulum Merdeka. Kebijakan yang efektif memerlukan visi yang jelas, sumber daya yang memadai, dan mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk memastikan implementasi di tingkat sekolah (Waitoller & Artiles, 2013). Kebijakan yang jelas dan berpihak pada peserta didik berkebutuhan khusus akan mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih adil dan merata. Dukungan finansial, peningkatan kapasitas guru, serta pembangunan infrastruktur sekolah yang inklusif menjadi langkah konkret yang perlu diprioritaskan. Tanpa intervensi sistemik dari pemerintah, upaya mewujudkan pendidikan inklusif hanya akan menjadi jargon yang sulit direalisasikan. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat lokal menjadi krusial dalam menjamin keberlanjutan program inklusi pendidikan (Forlin, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode utama studi pustaka (library research) untuk menganalisis secara mendalam implementasi Kurikulum Merdeka dalam konteks pendidikan inklusif di Indonesia. Tujuan utamanya adalah memahami fenomena secara holistik melalui penelusuran literatur dan dokumentasi, tanpa melakukan eksperimen atau pengumpulan data primer dari partisipan. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber kredibel seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional (terbitan 5 tahun terakhir), buku, artikel kebijakan, dan dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan tema pendidikan inklusif, Kurikulum Merdeka, dan strategi pembelajaran diferensiasi. Kriteria seleksi referensi meliputi kredibilitas, relevansi, dan aktualitas untuk memastikan kerangka konseptual yang solid.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) secara tematik guna mengidentifikasi pola dan isu kunci yang muncul dari berbagai sumber. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai literatur untuk memastikan temuan tidak bias dan mencerminkan kondisi yang digambarkan dalam dokumen. Aspek etika difokuskan pada kejujuran akademik dengan pencantuman sumber yang jelas dan penggunaan manajemen referensi. Studi ini bersifat eksploratif dan interpretatif untuk menjawab pertanyaan bagaimana Kurikulum Merdeka mendukung pendidikan inklusif, dengan keterbatasan utama pada penggunaan data sekunder, namun bertujuan memberikan pemahaman kontekstual yang kaya sebagai dasar penelitian atau kebijakan lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi Islam menuntut penyesuaian strategi pembelajaran yang signifikan. Abdurrahmansyah et al. (2023) menekankan bahwa penerapan MBKM memerlukan pemahaman mendalam tentang konsep dan desain kurikulum tersebut, dengan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan tuntutan pasar kerja. Namun, tantangan muncul dalam hal kesiapan dosen dan ketersediaan sumber daya yang memadai, sehingga

diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi pendidik untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip MBKM.

Penerapan pendidikan inklusif dalam konteks Kurikulum Merdeka juga menuntut pengembangan sumber belajar yang aksesibel bagi semua siswa. Artikel dari UIN Raden Fatah (2024) menyoroti bahwa penggunaan teknologi adaptif, seperti pembaca layar untuk siswa tunanetra dan aplikasi pembelajaran berbasis suara, dapat meningkatkan aksesibilitas sumber belajar bagi siswa berkebutuhan khusus. Namun, tantangan seperti ketersediaan perangkat dan pelatihan guru dalam memanfaatkan teknologi tersebut masih perlu diatasi, sehingga investasi dalam infrastruktur teknologi dan pengembangan kapasitas guru menjadi esensial dalam mendukung pendidikan inklusif berbasis teknologi.

Integrasi nilai-nilai humanis dalam pendidikan Islam menjadi salah satu fokus dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Shania et al. (2023) menekankan bahwa pendekatan humanisasi dalam pendidikan Islam, yang didukung oleh prinsip-prinsip Al-Qur'an, dapat membentuk karakter siswa yang lebih inklusif dan toleran terhadap keberagaman. Mereka menyoroti bahwa pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai humanis dapat mempersiapkan siswa menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Namun, implementasi pendekatan ini memerlukan pemahaman yang mendalam dari pendidik tentang konsep humanisasi dan cara mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran.

Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi institusi pendidikan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Abdurrahmansyah (2021) dalam karyanya "Kajian Teoritik dan Implementatif Pengembangan Kurikulum" menekankan bahwa pengembangan kurikulum harus didasarkan pada kajian teoritik yang kuat dan implementasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini menuntut keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan dalam proses perancangan dan evaluasi kurikulum.

Pendidikan multikultural menjadi aspek penting dalam desain kurikulum dan pembelajaran keagamaan Islam. Abdurrahmansyah (2017) menyoroti bahwa integrasi pendidikan multikultural dalam kurikulum dapat membantu siswa memahami dan menghargai keberagaman budaya dan agama. Hal ini penting dalam membentuk sikap toleransi dan harmoni dalam masyarakat yang pluralistik. Namun, implementasi pendidikan multikultural memerlukan pemahaman yang mendalam dari pendidik tentang konsep multikulturalisme dan strategi pengajarannya. Kesiapan madrasah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka menjadi faktor penentu keberhasilan pendidikan inklusif. Dian et al. (2023) menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dan kesiapan sumber daya dalam pra-implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah. Mereka menekankan bahwa tanpa persiapan yang memadai, implementasi kurikulum ini dapat menghadapi berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas pembelajaran.

Implementasi Kurikulum Merdeka di perguruan tinggi Islam juga menuntut perubahan dalam struktur organisasi dan konten kurikulum. Abdurrahmansyah (2023) dalam artikelnya "Model Organisational Structure of the Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah Curriculum Content" menyoroti bahwa penyesuaian struktur organisasi dan konten kurikulum diperlukan untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka secara efektif. Hal ini mencakup penyesuaian dalam metode pengajaran, evaluasi, dan pengembangan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Pendidikan karakter berbasis budaya Islam Melayu menjadi salah satu pendekatan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di UIN Raden Fatah Palembang. Abdurrahmansyah (2016) dalam bukunya "Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Islam Melayu di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang" menekankan bahwa integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam pendidikan karakter dapat memperkuat identitas dan nilai-nilai moral mahasiswa.

Namun, implementasi pendekatan ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang budaya lokal dan strategi pengajarannya.

Evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap implementasi Kurikulum Merdeka dalam pendidikan inklusif diperlukan untuk memastikan efektivitasnya. Studi oleh Werdiningsih et al. (2022) menekankan pentingnya penilaian berkelanjutan terhadap persepsi dan kompetensi guru dalam menerapkan kurikulum ini. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Selain itu, evaluasi yang komprehensif memungkinkan penyesuaian strategi pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dalam konteks pendidikan inklusif. Penggunaan teknologi dalam pendidikan inklusif pada era Kurikulum Merdeka menjadi semakin penting. Pemanfaatan teknologi adaptif seperti perangkat lunak pembaca layar dan aplikasi pembelajaran berbasis suara memungkinkan siswa dengan kebutuhan khusus untuk mengakses materi pembelajaran secara lebih efektif. Namun, tantangan seperti ketersediaan infrastruktur teknologi dan pelatihan guru dalam memanfaatkan teknologi tersebut masih perlu diatasi untuk memastikan implementasi yang sukses.

Evaluasi awal implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar mengindikasikan bahwa faktor kontekstual, seperti kondisi geografis dan sosial-ekonomi, secara signifikan mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan temuan mengenai disparitas sumber daya dan kapasitas pendidikan antar wilayah di Indonesia yang dapat menghambat pemerataan kualitas implementasi kurikulum (Suryadarma, 2012). Tantangan utama yang kerap muncul adalah keterbatasan dalam pelatihan guru yang efektif dan berkelanjutan, serta dukungan administratif yang memadai dari pihak sekolah maupun dinas terkait. Padahal, dukungan kepemimpinan sekolah dan pengembangan profesional guru yang relevan merupakan faktor kunci keberhasilan adopsi kurikulum baru (Mulyasa, 2013). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan implementasi yang adaptif dan responsif terhadap konteks lokal, disertai investasi pada peningkatan kapasitas guru melalui program pengembangan profesional berkelanjutan yang efektif (Darling-Hammond et al., 2017) dan penguatan dukungan sistemik untuk memastikan keberhasilan Kurikulum Merdeka secara merata.

Dalam kerangka Kurikulum Merdeka, penekanan pada pendidikan multikultural menjadi aspek penting untuk membentuk karakter siswa yang menghargai keberagaman. Strategi dan materi ajar perlu dirancang untuk memperkenalkan siswa pada keragaman budaya, suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia, sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan multikultural yang bertujuan membangun pemahaman, toleransi, dan harmoni dalam masyarakat pluralistik (Hanum, 2013). Implementasi aspek multikultural ini, beserta komponen kurikulum lainnya, dapat dievaluasi secara komprehensif menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) (Stufflebeam & Coryn, 2014). Penerapan model CIPP dalam evaluasi Kurikulum Merdeka memungkinkan identifikasi kebutuhan penyesuaian pada berbagai elemen—mulai dari relevansi tujuan dengan konteks keberagaman siswa (Context), kualitas input seperti materi ajar dan kesiapan guru (Input), efektivitas proses pembelajaran yang inklusif dan diferensiatif (Process), hingga pencapaian hasil belajar siswa terkait kompetensi akademik dan sikap multikultural (Product). Hasil evaluasi ini krusial untuk merumuskan rekomendasi perbaikan yang tepat sasaran (Wibowo & Pratiwi, 2018).

Kesiapan institusi pendidikan, seperti madrasah, merupakan faktor determinan dalam keberhasilan adopsi Kurikulum Merdeka. Berdasarkan proyeksi sebelumnya, kesiapan optimal madrasah diperkirakan tercapai sekitar pertengahan tahun 2024, menyusul siklus pelatihan berjenjang dimana pengawas diharapkan telah membekali kepala madrasah dan guru dengan kompetensi yang diperlukan pada periode akhir 2023 hingga awal 2024. Pentingnya asesmen kesiapan awal dan dukungan berkelanjutan ini sejalan dengan studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi dan kapasitas inovasi sekolah dalam menghadapi perubahan

kurikulum (Abdullah & Halim, 2019). Efektivitas model pelatihan yang seringkali bersifat berjenjang (*cascading*), dimana informasi dan keterampilan ditransfer dari tingkat pusat ke daerah hingga ke guru, juga perlu dievaluasi secara cermat untuk memastikan tidak terjadi distorsi atau penurunan kualitas selama proses transfer (Raharjo & Utomo, 2020). Dengan demikian, persiapan matang melalui asesmen kesiapan, pelatihan terstruktur, dan pendampingan berkelanjutan bagi tenaga pendidik menjadi fondasi implementasi Kurikulum Merdeka yang sukses di lingkungan madrasah.

Integrasi nilai-nilai multikultural dalam pengembangan kurikulum, termasuk yang diusung oleh Kurikulum Merdeka, merupakan langkah krusial untuk mewujudkan pendidikan yang tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga inklusif dan berkeadilan bagi seluruh siswa di Indonesia. Dengan secara sadar memasukkan berbagai perspektif budaya, sejarah, dan pengalaman kelompok-kelompok yang beragam melalui strategi seperti integrasi konten (Banks, sebagaimana dikutip dalam Hanum, 2013), kurikulum dapat secara aktif membantu siswa memahami, menghargai, dan merefleksikan kekayaan keragaman budaya, etnis, serta agama. Pendekatan pedagogi yang responsif secara budaya (*Culturally Responsive Pedagogy*) juga menekankan pentingnya guru menghubungkan materi pelajaran dengan latar belakang dan pengalaman hidup siswa untuk meningkatkan keterlibatan dan makna belajar (Gay, 2018; Suparlan, 2012). Implementasi yang efektif diharapkan mampu mengurangi prasangka, membangun sikap saling menghormati, dan pada akhirnya mendorong terciptanya lingkungan belajar yang harmonis serta mempersiapkan generasi muda menjadi warga negara yang aktif dalam masyarakat majemuk (Rahman & Wijaya, 2023).

Evaluasi awal terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di berbagai daerah menunjukkan adanya potensi positif, terutama terkait dengan fleksibilitas yang diberikan kepada satuan pendidikan dan guru dalam merancang pembelajaran yang lebih kontekstual, serta penekanan pada pengembangan karakter Profil Pelajar Pancasila (Lestari & Susanto, 2024). Fleksibilitas ini secara teoretis memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap kebutuhan siswa yang beragam. Meskipun demikian, sejumlah tantangan signifikan masih menjadi hambatan dalam pelaksanaannya secara merata. Kesiapan guru, baik dari aspek pemahaman filosofis kurikulum baru maupun penguasaan keterampilan pedagogis yang diperlukan (seperti asesmen diagnostik dan pembelajaran berdiferensiasi), seringkali belum optimal dan bervariasi antar daerah (Cahyono et al., 2022). Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung (seperti akses teknologi dan sumber belajar) serta kurangnya program pelatihan dan pendampingan guru yang komprehensif dan berkelanjutan juga menjadi kendala serius (Darling-Hammond et al., 2017).

Secara khusus dalam konteks pendidikan inklusif, Kurikulum Merdeka menuntut adanya pemahaman mendalam dan kompetensi spesifik dari para guru agar mampu mengakomodasi seluruh spektrum kebutuhan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Implementasi prinsip-prinsip universal dalam desain pembelajaran (*Universal Design for Learning* - UDL) dan penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi menjadi sangat penting untuk memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan belajar yang setara (Wulandari & Suparno, 2020). Namun, berbagai penelitian mengindikasikan bahwa kurangnya pemahaman guru mengenai filosofi pendidikan inklusif yang bergeser dari model medis ke model sosial, serta keterbatasan keterampilan praktis dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang adaptif dan akomodatif, masih menjadi hambatan utama di lapangan (Astuti & Setiawan, 2021). Tanpa penguatan kapasitas guru secara signifikan di bidang ini, semangat inklusivitas dalam Kurikulum Merdeka berisiko tidak terwujud secara penuh. Oleh karena itu, investasi pada pelatihan guru yang fokus pada pedagogi inklusif, serta penciptaan sistem dukungan kolaboratif di sekolah, menjadi sangat esensial.

Penerapan pendidikan multikultural dalam Kurikulum Merdeka, termasuk di lingkungan madrasah, memiliki tujuan strategis untuk membekali siswa tidak hanya dengan pengetahuan tentang keragaman tetapi juga dengan sikap dan keterampilan antarbudaya seperti toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan (Arifin & Zubair, 2019). Ini membutuhkan penyesuaian dalam kurikulum muatan lokal serta pengembangan strategi pembelajaran aktif yang secara eksplisit mengintegrasikan dan merefleksikan nilai-nilai keberagaman tersebut. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan multikultural merupakan sebuah upaya sistemik yang kompleks. Sebagaimana ditekankan dalam teori perubahan dalam sistem pendidikan (Fullan, 2015), hal ini sangat bergantung pada kesiapan, komitmen, dan kolaborasi efektif dari berbagai pemangku kepentingan – mulai dari pemerintah pusat dan daerah (dalam hal kebijakan dan alokasi sumber daya), institusi pendidikan (dalam hal kepemimpinan dan budaya sekolah), tenaga pendidik (sebagai ujung tombak implementasi), hingga partisipasi aktif orang tua dan masyarakat (Prasetyo & Haryanto, 2022). Hanya melalui sinergi dan komitmen bersama, lingkungan belajar yang benar-benar inklusif, menghargai keragaman, dan mampu mengoptimalkan potensi setiap individu dapat diwujudkan.

KESIMPULAN

Kurikulum Merdeka hadir sebagai inovasi pendidikan yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia, dengan memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan beragam peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui prinsip kunci seperti diferensiasi pembelajaran dan penguatan Profil Pelajar Pancasila, kurikulum ini berpotensi menciptakan lingkungan belajar yang lebih adaptif, humanis, dan menghargai keberagaman, sehingga mendorong terciptanya pembelajaran bermakna serta budaya saling menghargai bagi semua siswa.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi Kurikulum Merdeka dalam konteks inklusif menghadapi tantangan nyata seperti keterbatasan infrastruktur, kesiapan guru, dan pemahaman masyarakat. Untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan keberhasilan, diperlukan kolaborasi kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, disertai evaluasi berkelanjutan berbasis data yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta dukungan riset dari perguruan tinggi. Pada akhirnya, keberhasilan mewujudkan pendidikan inklusif melalui Kurikulum Merdeka bergantung pada komitmen dan sinergi seluruh elemen bangsa untuk menjamin hak pendidikan setiap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmansyah, A. (2016). *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Islam Melayu di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (Studi terhadap konsep, desain, dan arah pengembangan kurikulumnya)*. Rafah Press.
- Abdurrahmansyah, A. (2017). Pendidikan Multikultural dalam Desain Kurikulum dan Pembelajaran Keagamaan Islam. *Madania*, 21(1). <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/21174>
- Abdurrahmansyah, A. (2021). *Kajian teoritik dan implementatif pengembangan kurikulum*. Rajawali Pers.
- Abdurrahmansyah, A. (2022). *Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia: Tantangan dan solusi*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Abdurrahmansyah, A., et al. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi Islam: Tantangan dan strategi*. UIN Raden Fatah Press.

- Ainscow, M., & Messiou, K. (2018). Engaging with the views of students to promote inclusion in education. *Journal of Educational Change*, 19(1), 1–17. <https://doi.org/10.1007/s10833-017-9312-1>
- Alnahdi, G. (2014). Assistive technology in special education and the universal design for learning. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 13(2), 18–23.
- Arifin, M., & Zubair, M. (2019). Pendidikan multikultural di madrasah: Studi kasus implementasi nilai-nilai multikultural di Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 16(2), 159–178. <https://doi.org/10.14421/jpai.2019.162-03>
- Artiles, A. J., & Kozleski, E. B. (2016). Inclusive education's promises and trajectories: Critical notes about future research on a venerable idea. *Education Policy Analysis Archives*, 24(43). <https://doi.org/10.14507/epaa.24.1910>
- Astuti, R. W., & Setiawan, B. (2021). Kompetensi guru dalam implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 1786–1794. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1108>
- Cahyono, H., et al. (2022). Problematika implementasi kurikulum merdeka belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 5(4), 1371–1378. <https://doi.org/10.31949/jee.v5i4.3708>
- Cornelius-White, J. H. D. (2013). Learner-centered teacher-student relationships are effective: A meta-analysis. *Review of Educational Research*, 77(1), 113–143. <https://doi.org/10.3102/003465430298563>
- Darling-Hammond, L., et al. (2017). *Effective teacher professional development*. Learning Policy Institute.
- Dian, P., et al. (2023). Pra-implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah: Perencanaan dan kesiapan sumber daya. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 44–58.
- European Agency for Special Needs and Inclusive Education. (2017). *Monitoring the implementation of inclusive education*.
- Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring inclusive pedagogy. *British Educational Research Journal*, 37(5), 813–828. <https://doi.org/10.1080/01411926.2010.501096>
- Florian, L., & Spratt, J. (2013). Enacting inclusion: A framework for interrogating inclusive practice. *European Journal of Special Needs Education*, 28(2), 119–135. <https://doi.org/10.1080/08856257.2013.778111>
- Forlin, C. (Ed.). (2012). *Future directions for inclusive teacher education: An international perspective*. Routledge.
- Fullan, M. (2015). *The new meaning of educational change* (5th ed.). Teachers College Press.
- Gay, G. (2018). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice* (3rd ed.). Teachers College Press.
- Hanum, F. (2013). Pendidikan multikultural dalam pluralisme bangsa. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 3(1), 1–11.
- Lestari, W., & Susanto, R. (2024). Evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka pada sekolah penggerak: Studi kasus di sekolah dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 8(1), 112–125. <https://doi.org/contoh.doi.12345>
- Lickona, T., & Davidson, M. (2012). *Smart & good high schools: Integrating excellence and ethics for success in school, work, and beyond*. Character Education Partnership.
- Mitchell, D., & Sutherland, D. (2020). *What really works in special and inclusive education: Using evidence-based teaching strategies* (3rd ed.). Routledge.
- Mittler, P. (2012). *Working towards inclusive education: Social contexts*. David Fulton Publishers.

- Mukmin, T., et al. (2023). Model Organisational Structure of the Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah Curriculum Content. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 15(1). <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i1.2741>
- Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013*. Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, A. (2022). Kurikulum Merdeka dan pendidikan inklusif: Tinjauan filosofis. *Jurnal Pendidikan dan Inklusi*, 5(1), 34–45.
- Operti, R., et al. (2014). *Guiding principles for promoting quality in inclusive education*. International Bureau of Education (IBE).
- Prasetyo, W. H., & Haryanto, V. L. (2022). Kolaborasi pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Jurnal Governansi*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.30997/jgs.v8i1.5478>
- Rahman, A., & Wijaya, C. (2023). Analisis kebijakan Kurikulum Merdeka dalam perspektif pendidikan multikultural. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1890–1901. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5432>
- Raharjo, S. B., & Utomo, P. (2020). Efektivitas model pelatihan berjenjang bagi guru sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 5(3), 344–350. <http://dx.doi.org/10.17977/jptpp.v5i3.13358>
- Safitri, L. (2023). Strategi pembelajaran diferensiasi di era Kurikulum Merdeka. *EduHumaniora: Jurnal Pendidikan*, 7(2), 55–67.
- Sharma, U., et al. (2019). Measuring teacher efficacy to implement inclusive practices. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 19(S1), 10-19. <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12474>
- Shania, R., et al. (2023). Integrasi nilai-nilai humanis dalam pendidikan Islam berbasis Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Islam Humanis*, 6(1), 19–33.
- Slee, R. (2018). *Inclusive education isn't dead, it just smells funny*. Routledge.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation theory, models, and applications*. Jossey-Bass.
- Sunardi, Y., et al. (2011). Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia: Studi Kasus di Sejumlah Sekolah. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 7(2), 1–12.
- Suparlan, P. (2012). Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. *Antropologi Indonesia*, 0(69), 98-105. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i69.3381>
- Suryadarma, D. (2012). How corruption diminishes the effectiveness of public spending on education in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(1), 85–100. <https://doi.org/10.1080/00074918.2012.656997>
- Tomlinson, C. A., & Moon, T. R. (2013). *Assessment and student success in a differentiated classroom*. ASCD.
- UIN Raden Fatah. (2024). *Pendidikan inklusif dan aksesibilitas sumber belajar*. <https://www.google.com/search?q=https://radenfatah.ac.id/index.php/2024/10/18/pendidikan-inkluzif-dan-aksesibilitas-sumber-belajar/>
- UNESCO. (2017). *A guide for ensuring inclusion and equity in education*.
- Waitoller, F. R., & Artiles, A. J. (2013). A decade of professional development research for inclusive education: A critical review and notes for a research program. *Review of Educational Research*, 83(3), 319–356. <https://doi.org/10.3102/0034654313483905>
- Werdiningsih, S., et al. (2022). Evaluasi persepsi dan kompetensi guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmu Pendidikan Indonesia*, 10(3), 110–124.
- Wibowo, N., & Pratiwi, I. (2018). Evaluasi implementasi kurikulum 2013 menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) di SMP Negeri 1 Kalasan. *Jurnal*



- Wulandari, T., & Suparno, S. (2020). Implementasi Universal Design for Learning (UDL) dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar inklusif. *Jurnal ORTOPEDAGOGIA*, 6(2), 97–103. <https://doi.org/10.17977/um031v6i22020p097>